



Article Informations
Corresponding Email:
trisnagaluha@gmail.com

Received: 05/02/2025; Accepted:
16/02/2025; Published: 30/06/2025

KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG MENGHADAPI KEBANGKITAN MILITER TIONGKOK TAHUN 2021-2024

**Trisna Galuh Apriannisa Susanto¹⁾, Suwarti Sari²⁾, I Wayan Aditya
Harikesa³⁾**

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Jepang dalam menanggapi meningkatnya ketegasan militer Tiongkok dari tahun 2021 hingga 2024, khususnya terkait klaim teritorial atas Kepulauan Senkaku. Seiring dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok, Jepang terpaksa harus mempertimbangkan kembali postur keamanannya untuk memastikan kelangsungan hidup negaranya. Dengan menggunakan pendekatan realisme, penelitian ini menganalisis faktor-faktor domestik dan internasional yang membentuk keputusan kebijakan Jepang, dengan fokus pada pertimbangan keamanan dan pertahanan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian ini menjelaskan langkah-langkah proaktif Jepang untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Strategi utamanya mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, memodernisasi kemampuan militer dengan fokus pada kapasitas serangan balik, memperkuat aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat, menghindari keterlibatan yang berlebihan dalam konflik regional, dan mengadopsi sikap tegas terhadap peningkatan militer. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kebijakan luar negeri Jepang yang terus berkembang dalam menyikapi dinamika keamanan regional yang dinamis.

Kata Kunci: Kebijakan luar negeri, Jepang, Kebangkitan Tiongkok, Keamanan, Militer.

Abstract

This study analyzes Japan's foreign policy in response to China's rising military assertiveness from 2021 to 2024, particularly concerning territorial claims over the Senkaku Islands. As China's influence grows, Japan is compelled to reassess its security posture to ensure national survival. Employing realism approach, the research investigates both domestic and international factors shaping Japan's policy decisions, focusing on security and defense considerations. Utilizing qualitative research methods, the findings illustrate Japan's proactive measures to address the challenge

posed by China. Key strategies include enhancing stability and security in the Indo-Pacific region, modernizing military capabilities with a focus on counter-strike capacity, strengthening defense alliances with the United States, avoiding excessive involvement in regional conflicts, and adopting a firm stance on military enhancements. This research underscores the importance of Japan's evolving foreign policy as it navigates the complexities of regional security dynamics and emphasizes the need for a robust defense strategy in the face of increasing geopolitical tensions.

Keywords: Foreign policy, Japan, China's rise, Security, Military.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri adalah aspek penting dalam hubungan internasional meliputi strategi dan tujuan yang diterapkan oleh negara-negara untuk berinteraksi dengan negara lain juga para aktor global.¹ Hal ini melibatkan penetapan tujuan kebijakan dalam lingkungan yang kompetitif pada hubungan internasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi kemampuan militer, kemitraan perdagangan dan pengaruh politik kebijakan luar negeri merupakan penentu dari tingkah laku suatu negara.² Dalam lingkungan yang disebut sebagai anarki, persaingan antar negara menjadi sesuatu yang normatif sehingga negara-negara harus memprioritaskan kelangsungan hidup dan keamanannya yang sering kali mengakibatkan perebutan kekuasaan. Dinamika persaingan terjadi karena distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara negara-negara, karena berusaha untuk memaksimalkan kekuatan serta posisi relatifnya masing-masing dalam sistem internasional.³ Salah satu negara yang berupaya untuk memaksimalkan kekuatan serta posisi regionalnya adalah Tiongkok.

Kebangkitan militer Tiongkok dapat diartikan sebagai pertumbuhan militer Tiongkok yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Peningkatan kekuatan negara menjadikan Tiongkok mengambil sikap yang lebih agresif dalam sengketa teritorial dan memperluas pengaruhnya. Tiongkok telah mengklaim serta

¹ Watson, Adam. *Morgenthau's Concept of the National Interest and the New States of the Third World*. routledge, 2020, pp. 305–15, <https://doi.org/10.4324/9780429339578-28>.

² Ibid.

³ Volgy, Thomas J., et al. *Major Power Status in International Politics*. palgrave macmillan us, 2011, pp. 1–26, https://doi.org/10.1057/9780230119314_1.

meningkatkan patroli dan aktivitas militer di wilayah Laut Tiongkok Timur, sekitar Kepulauan Senkaku atau Diaoyu yang disengketakan, pulau tersebut dikelola oleh Jepang. Hal ini menyebabkan adanya pertemuan menegangkan antara kapal laut serta pesawat terbang milik Tiongkok ataupun milik Jepang. Kemampuan angkatan laut dan udara Tiongkok yang terus berkembang termasuk kapal induk dan jet tempur canggih, telah memperluas kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan lebih jauh dari wilayah teritorialnya.⁴ Modernisasi militer negara Tiongkok dan perluasan persenjataan nuklirnya dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuatan regional maupun kepentingan keamanan bagi negara Jepang. Jepang telah merespons ancaman dari Tiongkok dengan meningkatkan pengeluaran dan kemampuan pertahanannya.

Hubungan Tiongkok dan Jepang dipenuhi dengan ketegangan faktor teritorial serta geopolitik yang memainkan peran penting bagi hubungan kedua negara, sengketa antara Jepang dan Tiongkok ditandai dengan meningkatnya upaya Tiongkok di wilayah Senkaku atau Diaoyu untuk mempertahankan klaim teritorialnya.⁵ Terlepas dari isu-isu historis antara Jepang dan Tiongkok ada beberapa upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara telah mengakui pentingnya hubungan ekonomi mereka dan telah berusaha untuk memisahkan ketegangan politik dari kerja sama ekonomi.⁶ Namun, efektivitas dari upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok belum dapat dipastikan karena masih adanya isu-isu mendasar dan konteks geopolitik yang lebih luas, termasuk meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat

⁴ Li, R. *China's Sea Power Aspirations and Strategic Behaviour in the South China Sea from the Theoretical Perspective of Identity Construction* (pp. 117–137). 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26152-2_6

⁵ Amako, Satoshi. "China, the Emerging Superpower and Drifting Sino-Japanese Relations." *Journal of Contemporary East Asia Studies*, vol. 1, no. 1, Jan. 2012, pp. 73–95, <https://doi.org/10.1080/24761028.2012.11869053>

⁶ Chiang, Min Hua. "Contemporary China-Japan Relations: The Politically Driven Economic Linkage." *East Asia*, vol. 36, no. 4, Dec. 2019, pp. 271–90, <https://doi.org/10.1007/s12140-019-09321-x>.

dan Tiongkok. Interaksi yang kompleks antara politik domestik, narasi sejarah, dan dinamika internasional terus membentuk hubungan yang rumit dan sering kali paradoks antara Tiongkok dan Jepang.⁷

Adanya perubahan struktural dan pergeseran keseimbangan kekuatan di Asia Timur telah menyebabkan perbedaan strategis dan dinamika Jepang dan Tiongkok yang menyebabkan dilema keamanan dalam hubungan bilateralnya. Bangkitnya konservatisme di Jepang dan penggunaan "kartu sejarah" oleh Tiongkok telah memperburuk rasa saling tidak percaya.⁸ Setelah perang dunia dua dan Jepang akhirnya menyerah, Jepang mengalami reformasi yang signifikan, salah satunya adalah reformasi militer Jepang yang direduksi menjadi *Japan Self Defense Force* (JSDF), artinya fungsi militer Jepang hanya diperuntukan untuk mempertahankan negaranya dari dalam negeri.⁹

Dilema keamanan antara Jepang dan Tiongkok menunjukkan bahwa ketika Tiongkok memperkuat militernya, Jepang menganggap hal ini sebagai ancaman yang menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Upaya Tiongkok untuk mengubah *status quo* dipandang merusak tatanan internasional berbasis aturan yang dijunjung oleh Jepang. Keluhan historis dan nasionalisme di kedua belah pihak terus memperumit hubungan Tiongkok dan Jepang dan memicu rasa saling tidak percaya, sehingga semakin sulit untuk meredakan ketegangan.

Sikap Jepang terhadap Tiongkok sangat dipengaruhi oleh ancaman militer, politik dan ekonomi Tiongkok. Kekhawatiran akan ancaman-ancaman dari Tiongkok cenderung memperburuk persepsi

⁷ Takeuchi, Hiroki. "Sino-Japanese Relations: Power, Interdependence, and Domestic Politics." *International Relations of the Asia-Pacific*, vol. 14, no. 1, Jan. 2014, pp. 7–32, <https://doi.org/10.1093/irap/lct023>.

⁸ Atanassova-Cornelis, Elena. "The Political and Security Dimension of Japan-China Relations: Strategic Mistrust and Fragile Stability." *Pacific Focus*, vol. 26, no. 2, 2011, pp. 165–87, <https://doi.org/10.1111/j.1976-5118.2011.01061.x>.

⁹ Nakano, Ryoko. "The Sino-Japanese Territorial Dispute and Threat Perception in Power Transition." *The Pacific Review*, vol. 29, no. 2, Mar. 2015, pp. 165–86, <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1013493>.

positif di kalangan masyarakat Jepang.¹⁰ Persepsi ini semakin diperkuat oleh sikap agresif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, yang telah menimbulkan keresahan di wilayah tersebut dan mendorong Jepang untuk mengambil langkah yang lebih aktif dalam perselisihan tersebut.¹¹ Dalam upayanya untuk mengatasi ancaman kebangkitan Tiongkok, Jepang juga mempertimbangkan peran yang lebih dominan dalam pertahanan dan kestabilan wilayahnya.¹²

Pergeseran postur pertahanan Jepang yang salah satunya adalah keinginan untuk memiliki kapasitas serangan balik merupakan respons dari Jepang ketika dihadapkan dengan ancaman yang nyata, yaitu kebangkitan Tiongkok yang semakin tegas menetapkan posisinya di kawasan Asia Timur. Jika dilihat melalui lensa realisme, Jepang berupaya untuk menyeimbangkan ancaman yang dirasakan oleh kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan regional dengan cara memperkuat pertahanan negaranya serta meningkatkan aliansinya dengan AS.

Fenomena kebangkitan Tiongkok menjadi kajian yang penting untuk dibahas mengingat keberadaan Jepang di Asia Timur memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas politik Asia Timur, dengan adanya dilema keamanan yang muncul karena kebangkitan Tiongkok, Jepang akan berupaya untuk menghadapi ancaman Tiongkok dengan mengambil kebijakan luar negeri yang akan berkontribusi dalam peningkatan kemampuan Jepang.

2. PEMBAHASAN

1. Upaya Jepang Dalam Meningkatkan Kekuatan Regional

¹⁰ Gong, Shun, and Kikuko Nagayoshi. "Japanese Attitudes Toward China and the United States: A Sociological Analysis." *Chinese Sociological Review*, vol. 51, no. 3, July 2019, pp. 251–70, <https://doi.org/10.1080/21620555.2019.1611374>.

¹¹ Ordaniel, Jeffrey. "Internationalization, Legalization and Deterrence: The United States and Japan in the South China Sea." *International Studies Review*, vol. 16, no. 2, Oct. 2015, pp. 93–119, <https://doi.org/10.1163/2667078x-01602005>.

¹² Khan, Arsh Shahid, and Aiysha Safdar. "EMERGING US-JAPAN RELATIONS AND IMPACT ON EAST ASIAN SECURITY." *Margalla Papers*, vol. 25, no. 2, Dec. 2021, pp. 109–20, <https://doi.org/10.54690/margallapapers.25.2.78>.

Kebijakan luar negeri Jepang terhadap kebangkitan Tiongkok, khususnya dalam konteks hegemoni regional, telah dibentuk oleh serangkaian keputusan dan respons strategis terhadap meningkatnya ketegasan Tiongkok. Oleh karena itu, peran Jepang sebagai kekuatan regional di Indo-Pasifik semakin penting dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut, terutama mengingat perubahan lanskap geopolitik yang dipengaruhi oleh kebangkitan Tiongkok.¹³ Inti dari pendekatan Jepang adalah strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), yang menekankan pentingnya tatanan internasional berbasis aturan. Visi ini berupaya untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok yang semakin besar sambil mempromosikan integrasi ekonomi dan kerja sama keamanan di antara negara-negara Indo-Pasifik. Jepang menyadari bahwa jalur laut utama di kawasan ini sangat penting tidak hanya untuk keamanannya sendiri tetapi juga untuk perdagangan global dan stabilitas ekonomi. Karena itu, Jepang telah memprioritaskan kerja sama pertahanan dan keterlibatan aktif dengan mitra regional untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan, termasuk modernisasi militer dan sengketa teritorial yang timbul dari sikap tegas Tiongkok. Kebijakan luar negeri Jepang yang proaktif telah menghasilkan hubungan yang lebih erat dengan sekutu-sekutu utama, khususnya melalui kerangka kerja minilateral seperti Dialog Keamanan Quadrilateral (Quad), yang mencakup Amerika Serikat, India, dan Australia. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan kolektif dan membangun arsitektur keamanan regional yang berjejaring yang dapat secara efektif mencegah agresi. Dengan membina hubungan-hubungan ini, Jepang memposisikan dirinya sebagai pemain utama yang mampu memengaruhi dinamika regional dan berkontribusi pada upaya pemeliharaan perdamaian.

¹³ Wilkins, Thomas. "Japan and Multipolarity in the Indo-Pacific: National Mobilisation and Resilience". *United States Studies Centre*. www.ussc.edu.au/japan-and-multipolarity-in-the-indo-pacific-national-mobilisation-and-resilience.

a. Peningkatan Militer Jepang dan Upaya Diplomatik Pada Tahun 2021

Pada tahun 2021, kebijakan luar negeri Jepang ditandai dengan fokus baru pada keamanan sebagai respons terhadap meningkatnya kemampuan militer dan ambisi teritorial Tiongkok. Pemerintah Jepang, di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida, menyadari bahwa ketegangan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dan meningkatnya kehadiran militernya menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Jepang. Kesadaran ini mendorong Jepang untuk mengadopsi postur pertahanan yang lebih proaktif, yang mencakup peningkatan signifikan dalam pengeluaran pertahanan dan upaya modernisasi militer. Upaya diplomatik juga memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri Jepang terhadap Tiongkok selama periode ini. Meskipun ketegangan terus berlanjut, kedua negara menyadari perlunya dialog untuk mengelola hubungan mereka yang rumit. Pada bulan Desember 2021, menyusul pernyataan pejabat Jepang yang mendukung Taiwan, Tiongkok memanggil duta besar Jepang sebagai protes. Namun, kedua negara sepakat untuk membuat saluran telepon militer yang bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman atas wilayah yang disengketakan dan mengelola krisis secara efektif. Keterlibatan diplomatik ini mencerminkan pemahaman bahwa meskipun persaingan tidak dapat dihindari, kerja sama juga penting untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

b. Kekhawatiran Jepang Akibat Insiden Rudal Tiongkok Pada Tahun 2022

Sengketa teritorial antara Jepang dan Tiongkok atas Kepulauan Senkaku semakin menggambarkan kompleksitas hubungan mereka dan keinginan Jepang untuk melakukan pendekatan terhadap hegemoni regional. Pada bulan Agustus 2022, selama kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat yakni Nancy Pelosi ke Taiwan, Tiongkok melakukan serangan rudal di dekat Taiwan yang mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Insiden ini memicu protes keras dari pejabat Jepang, yang menganggapnya sebagai ancaman serius bagi keamanan

nasional. Tanggapan Jepang menyoroti tekadnya untuk melindungi integritas teritorialnya dan menegaskan hak-haknya dalam menghadapi provokasi Tiongkok. Kerangka kerja Mearsheimer menunjukkan bahwa insiden semacam itu memaksa negara-negara seperti Jepang untuk mengambil sikap yang lebih agresif guna mencegah pesaing melanggar kedaulatan mereka.¹⁴

c. Upaya Jepang Menekan Pengembangan Teknologi Tiongkok Pada Tahun 2023

Selain langkah-langkah militer, Jepang telah berupaya untuk memperkuat hubungan ekonominya dengan aktor regional lainnya sebagai bagian dari strateginya untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok. Ketergantungan ekonomi antara Tiongkok dan Jepang sangat signifikan namun, beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan ketegangan atas praktik perdagangan dan transfer teknologi. Pada tahun 2023, Jepang mengumumkan pembatasan ekspor pada peralatan manufaktur semikonduktor yang sejalan dengan kebijakan AS untuk membatasi akses Tiongkok ke teknologi canggih. Meskipun pembatasan ini tidak secara eksplisit ditujukan pada Tiongkok, pembatasan ini merupakan indikasi strategi Jepang yang lebih luas untuk mengekang kemajuan teknologi Tiongkok dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam industri-industri penting. Dimensi ekonomi ini sejalan dengan pernyataan Mearsheimer bahwa kekuatan-kekuatan besar akan memanfaatkan alat-alat militer dan ekonomi dalam upaya mereka untuk mendapatkan hegemoni regional.

d. Upaya Jepang Menghadapi ancaman Tiongkok dan Korea Utara Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, media Jepang melaporkan insiden yang melibatkan intruksi Tiongkok ke wilayah udara dan perairan teritorial Jepang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang niat Tiongkok di

¹⁴ Asahi Shimbun. "China and Japan Hold Talks on Taiwan, North Korea, and Regional Security." Asahi Shimbun, 12 Aug. 2022, [web.archive.org/web/20220812063020/https://www.asahi.com/ajw/articles/14687821](https://www.asahi.com/ajw/articles/14687821).

kawasan tersebut. Provokasi ini menggarisbawahi pendapat Mearsheimer tentang sifat siklus persaingan di antara negara-negara besar, ketika satu negara berusaha untuk menegaskan dominasi, hal itu sering kali memicu reaksi defensif dari negara-negara lain.¹⁵ Bahwa negara-negara harus bersiap menghadapi potensi konflik dengan para pesaing yang ingin mendominasi kawasan, pada akhir Juli 2024, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan mitranya dari Jepang Kamikawa Yoko di sela-sela konferensi ASEAN, yang menyoroti perlunya dialog di tengah meningkatnya ketegangan atas isu-isu historis dan sengketa perdagangan.¹⁶ Keterlibatan semacam itu sangat penting untuk mengelola hubungan bilateral tetapi juga mencerminkan persaingan yang mendasarinya untuk hegemoni regional. Dilanjutkan pada bulan Desember 2024, kabinet Jepang menyetujui anggaran pertahanan rekor yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan militernya dalam menanggapi ancaman regional, khususnya dari Tiongkok dan Korea Utara.¹⁷

2 Membangun Militer yang Kuat

Dalam sistem tidak adanya otoritas pusat untuk menegakkan aturan atau menyediakan keamanan, negara harus mengandalkan kekuatan militer mereka sendiri untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dan melindungi kepentingan mereka. Alasan di balik keharusan ini berakar pada keyakinan bahwa kekuatan militer adalah cara paling efektif untuk mencegah agresi dari para pesaing dan mencapai hegemoni regional.¹⁸ Upaya Jepang untuk membangun militer yang kuat sangat

¹⁵ Bloomberg News. "Japan Scrambles Fighters After Chinese Military Plane Incursion." Bloomberg, 26 Aug. 2024, www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-26/japan-scrambles-fighters-after-chinese-military-plane-incursion.

¹⁶ The Asan Forum. "Country Report: Japan (June 2024)." The Asan Forum, June 2024, www.theasanforum.org/country-report-japan-june-2024/.

¹⁷ AP News. "Japan's Military Budget to Grow as Tensions Rise with China." AP News, 20 Dec. 2024, apnews.com/article/japan-military-budget-us-australia-china-f82c70bd6f5cbfc184f15cf17f2fde21.

¹⁸ Lobell, Steven E. "The Evolution of Offensive Realism." *Politics and the Life Sciences*, vol. 40, no. 1, 2021, pp. 91–93. Cambridge University Press, doi:10.1017/pls.2021.7.

terkait erat dengan tujuan strategisnya untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan Indo-Pasifik. Seiring dengan perubahan lanskap geopolitik, Jepang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan kemampuan militernya dan menegaskan statusnya sebagai kekuatan regional. Perkembangan ini telah meningkatkan persepsi Jepang terhadap ancaman keamanan, yang mengharuskan kalibrasi ulang postur pertahanannya. Secara historis dibatasi oleh konstitusi pasifiknya, Jepang secara bertahap beralih ke kebijakan pertahanan yang lebih proaktif untuk mengatasi tantangan ini. Pergeseran ini terbukti dalam penerapan visi "*Free and Open Indo-Pacific*" (FOIP), yang berupaya untuk mempromosikan tatanan berbasis aturan dan mengimbangi pengaruh Tiongkok melalui kesiapan militer dan kerja sama regional. Dalam hal kebijakan luar negeri Jepang terhadap kebangkitan Tiongkok, hal-hal ini dapat diamati dalam kebijakan pertahanan Jepang mulai tahun 2021 dan seterusnya. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida, Jepang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan kemampuan militernya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok atas berbagai masalah seperti sengketa Kepulauan Senkaku dan aktivitas militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.¹⁹

a. Reformasi Kebijakan Militer Jepang Pada Tahun 2021

Pada tahun 2021, Jepang mulai meninjau kembali postur pertahanannya di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang ekspansi militer Tiongkok dan klaim teritorial yang agresif, khususnya di Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah Jepang memulai tinjauan komprehensif terhadap Pedoman Program Pertahanan Nasionalnya, dengan mengakui perlunya strategi militer yang lebih kuat untuk mengatasi ancaman yang muncul. Penilaian ulang ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan Tiongkok di perairan regional dan modernisasi militernya yang cepat,

¹⁹ "Japan Boosts Maritime Defenses Amid PRC's Senkaku Islands Coercion." IPDefense Forum, 10 May 2024, ipdefenseforum.com/2024/05/japan-boosts-maritime-defenses-amid-prcs-senkaku-islands-coercion/.

yang mencakup kemajuan dalam teknologi rudal dan kemampuan angkatan laut. Urgensi tinjauan ini ditegaskan oleh meningkatnya ketegangan di sekitar Taiwan, di mana banyak pejabat Jepang menyatakan kekhawatiran atas potensi agresi Tiongkok.²⁰ Pada bulan Desember 2021, Jepang meluncurkan strategi keamanan nasional baru yang bertujuan untuk menggandakan pengeluaran pertahanannya selama lima tahun ke depan. Rencana ambisius ini dimotivasi oleh pengakuan bahwa Jepang berada dalam lingkungan keamanan yang semakin parah karena pembangunan militer Tiongkok dan ambisi nuklir Korea Utara. Strategi tersebut menekankan perlunya Jepang untuk mengembangkan "kemampuan serangan balik" untuk mencegah potensi ancaman secara efektif. Hal ini menandai pergeseran signifikan dari sikap pasifis Jepang pasca-Perang Dunia II, yang mencerminkan pernyataan Mearsheimer bahwa negara harus mempersiapkan diri secara militer untuk melindungi kepentingan mereka dari pesaing.²¹

b. Meningkatkan Kerjasama Militer Pada Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Jepang terus meningkatkan anggaran pertahanannya, menandai tahun ke-13 berturut-turut peningkatan belanja. Dalam konteks ini, Jepang terlibat dalam latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat dan sekutu lainnya, yang menekankan interprobabilitas dan kesiapan menghadapi potensi ancaman dari Tiongkok. Latihan-latihan ini mencakup latihan maritim yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama angkatan laut dan menunjukkan kemampuan pertahanan kolektif dalam menanggapi provokasi Tiongkok. Pada bulan Desember 2022, Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan strategi keamanan nasional yang transformatif yang mencakup tiga dokumen kunci yang menguraikan sikap

²⁰ Center for Strategic and International Studies (CSIS). "Japan's New National Security Strategy." Center for Strategic and International Studies, 18 Dec. 2022, www.csis.org/analysis/japans-new-national-security-strategy.

²¹ AP News. "Japan's Military Budget to Grow as Tensions Rise with China." AP News, 20 Dec. 2024, apnews.com/article/japan-military-budget-us-australia-china-f82c70bd6f5cbfc184f15cf17f2fde21.

pertahanan Jepang. Ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan sebelumnya yang membatasi kemampuan militer Jepang karena kendala konstitusi dan sentimen publik yang menentang militarisasi. Strategi baru ini menekankan kemampuan serangan jarak jauh, pertahanan udara dan misil terintegrasi, serta operasi siber dan luar angkasa yang ditingkatkan. Pemerintahan Kishida berjanji untuk menggandakan anggaran pertahanan Jepang menjadi 2% dari PDB dalam waktu lima tahun, mencerminkan komitmen untuk peningkatan militer yang substansial. Selain itu, Jepang juga meningkatkan kemampuan *Self Defense Forces* (SDF) sebagai respons langsung terhadap pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Didorong oleh kekhawatiran keamanan dan realitas geopolitik, Jepang telah memulai transformasi signifikan dalam postur pertahanannya melalui akuisisi teknologi canggih, penguatan aliansi, reformasi kebijakan, dan peningkatan dukungan publik terhadap kesiapan militer. Seiring perkembangan ini berlangsung, Jepang bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan nasionalnya tetapi juga untuk berkontribusi secara berarti terhadap stabilitas regional di tengah meningkatnya ketegangan di Asia Timur.

c. Investasi Pertahanan dan Modernisasi Militer Pada Tahun 2023

Pada Februari 2023, Jepang mengumumkan rencana untuk memperoleh peralatan militer canggih sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Ini termasuk pengadaan rudal jarak jauh yang mampu menyerang target jauh di dalam wilayah musuh, sehingga secara signifikan memperluas posisi pencegahan Jepang terhadap calon agresor seperti Tiongkok. Proses akuisisi rudal Tomahawk dimulai dengan pengumuman resmi pada tahun 2022, ketika Jepang mengungkapkan rencananya untuk membeli hingga 400 unit rudal tersebut. Pada bulan Januari 2023, Jepang secara resmi menandatangani kesepakatan dengan AS untuk pengadaan ini, yang mencakup dua tipe rudal Tomahawk, Block-4 dan Block-5, dengan total nilai sekitar \$2,35 miliar. Pengiriman rudal dijadwalkan akan dimulai pada tahun fiskal 2025, meskipun ada upaya

untuk mempercepat proses tersebut mengingat situasi keamanan yang semakin memburuk di kawasan. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Jepang akan membeli 200 unit model Tomahawk yang lebih lama antara tahun fiskal 2025 hingga 2027, sebelum menerima sisa dari kesepakatan tersebut yang terdiri dari model terbaru. Langkah ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya berfokus pada modernisasi peralatan militernya tetapi juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan operasionalnya secara cepat. Jepang juga telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung akuisisi ini. Dalam anggaran tahun fiskal 2023, pemerintah telah menyisihkan sekitar 211,3 miliar yen (sekitar \$1,6 miliar) untuk pengadaan rudal-rudal tersebut. Dengan jangkauan serangan mencapai 1.600 kilometer, rudal Tomahawk akan memberikan kemampuan strategis bagi Jepang untuk menyerang target di dalam wilayah musuh jika situasi memerlukan.

Pada bulan Juni 2023, Jepang menandatangani perjanjian pertahanan penting dengan Australia yang bertujuan untuk memperdalam kerja sama keamanan antara kedua negara. Perjanjian ini memungkinkan latihan militer bersama dan peningkatan pembagian intelijen, yang menyoroti semakin diakuinya kepentingan keamanan bersama dalam melawan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Negara akan mencari aliansi dan kemitraan untuk meningkatkan kemampuan militer mereka terhadap ancaman bersama.²² Pada bulan November 2023, Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa membunyikan peringatan tentang meningkatnya ketegasan Tiongkok selama pertemuan dengan mitranya dari Amerika Serikat dan Australia. Keterlibatan diplomatik ini menggarisbawahi komitmen Jepang terhadap keamanan regional sekaligus menekankan perlunya peningkatan kesiapan militer mengingat potensi konflik yang

²² Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). "Australia-Japan Joint Declaration on Security Cooperation." Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, www.dfat.gov.au/countries/japan/australia-japan-joint-declaration-security-cooperation.

melibatkan Taiwan.²³ Pada bulan Desember 2023, Kabinet Jepang menyetujui anggaran pertahanan yang mencapai rekor sekitar \$55 miliar untuk tahun fiskal 2024. Anggaran ini mencakup alokasi yang signifikan untuk memperoleh rudal jelajah jarak jauh dan meningkatkan sistem pertahanan rudal yang ditujukan untuk melawan ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara.

d. Kolaborasi Pengembangan Jet Tempur Pada Tahun 2024

Sejak Maret 2024, Jepang mengumumkan upaya kolaboratif dengan Inggris dan Italia untuk mengembangkan jet tempur generasi berikutnya yang akan dikerahkan pada tahun 2035. Prakarsa ini mencerminkan komitmen Jepang untuk memajukan keunggulan teknologinya dalam kemampuan militer sambil membina kemitraan internasional yang meningkatkan upaya keamanan kolektif melawan kekuatan yang sedang bangkit seperti Tiongkok.²⁴ Pada pertengahan 2024, Jepang melanjutkan lintasan modernisasi militernya di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan Tiongkok. Laporan menunjukkan bahwa Jepang telah berhasil mengerahkan sistem radar canggih dan meningkatkan kemampuan angkatan lautnya melalui pembangunan kapal perusak baru yang dilengkapi dengan sistem rudal jarak jauh. Perkembangan ini menunjukkan fokus strategis Jepang untuk meningkatkan postur pencegahannya sambil mempersiapkan potensi konflik yang timbul dari tindakan tegas Tiongkok di kawasan tersebut.²⁵

3. Meningkatkan Kekuatan Melalui Aliansi

Prinsip ini menyatakan bahwa negara, khususnya negara adidaya, akan berupaya meningkatkan keamanan dan pengaruh mereka dengan

²³ Pacific Forum. "Movement, but Minimal Progress." Pacific Forum, 12 Dec. 2024, cc.pacforum.org/2024/12/movement-but-minimal-progress/.

²⁴ The Defense Post. "UK, Italy, Japan Launch Joint Venture for Next-Generation Fighter Aircraft." The Defense Post, 14 Dec. 2024, thedefensepost.com/2024/12/14/uk-italy-japan-joint-venture/.

²⁵ Ministry of Defense of Japan. Defense of Japan 2024 Digest. Ministry of Defense of Japan, 2024, www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2024/pdf/DOJ2024_Digest_EN.pdf.

membentuk aliansi strategis dengan negara lain. Dalam konteks ini, pembentukan aliansi menjadi strategi rasional bagi negara yang berupaya meningkatkan keamanan mereka. Dengan bersatu dengan negara-negara yang memiliki pemikiran yang sama, negara-negara dapat menyatukan sumber daya dan kemampuan mereka, meningkatkan kekuatan kolektif mereka dalam melawan agresor potensial.²⁶ Di Asia Timur, Jepang telah berupaya untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat sebagai respons terhadap modernisasi militer Tiongkok dan ketegasan dalam perselisihan regional. Peningkatan aliansi dengan AS memiliki implikasi strategis bagi Jepang dalam beberapa hal. Kerja sama ini memberikan akses kepada Jepang terhadap teknologi militer canggih yang dimiliki oleh AS. Dengan adanya transfer teknologi dan pelatihan bersama, JSDF dapat meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Aliansi ini juga berfungsi sebagai deterrent terhadap agresi dari Tiongkok. Ketika Tiongkok mengetahui bahwa Jepang memiliki dukungan kuat dari AS, kemungkinan untuk melakukan tindakan agresif akan berkurang juga membantu memperkuat posisi diplomatik Jepang di kancah internasional. Dengan menjadi bagian dari aliansi yang lebih besar dengan AS, Jepang dapat lebih efektif dalam mempromosikan kepentingan nasionalnya serta norma-norma internasional seperti supremasi hukum dan penyelesaian sengketa secara damai.

a. Pembentukan Saluran Komunikasi Dengan AS Pada Tahun 2021

Pada awal tahun 2021, Jepang memulai penilaian ulang yang komprehensif terhadap lingkungan keamanannya. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan regional semakin dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan keamanan nasional Jepang. Hal ini mendorong pemerintah Jepang, di bawah Perdana Menteri Yoshihide Suga, untuk menekankan pentingnya memperkuat aliansi,

²⁶ Borg, Andrea. "John J. Mearsheimer: An Offensive Realist Between Geopolitics and Power." ResearchGate, 2014, www.researchgate.net/publication/263323588_John_J_Mearsheimer_An_offensive_realist_between_geopolitics_and_power.

khususnya dengan Amerika Serikat. Aliansi AS-Jepang ditegaskan kembali sebagai landasan strategi keamanan Jepang, dengan mengakui bahwa pengaturan pertahanan kolektif sangat penting untuk mencegah potensi agresi dari Tiongkok dan Korea Utara.²⁷ Pada bulan Desember 2021, Jepang dan Tiongkok sepakat untuk membuat saluran komunikasi militer yang bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengelola krisis atas wilayah yang disengketakan, termasuk Kepulauan Senkaku. Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian bilateral yang vital karena menunjukkan kesediaan Jepang untuk terlibat langsung secara diplomatis dengan Tiongkok sekaligus memperkuat komitmennya untuk menjaga kemitraan keamanan dengan Amerika Serikat. Saluran komunikasi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi antara pejabat militer Jepang dan Tiongkok, sehingga mengurangi risiko konflik yang tidak disengaja akibat kesalahan persepsi.²⁸

b. Menghadiri KTT Quads Summit Pada Tahun 2022

Pada bulan Maret 2022, Jepang berpartisipasi dalam latihan militer gabungan dengan pasukan Amerika Serikat sebagai respons terhadap uji coba rudal Korea Utara dan meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di kawasan tersebut. Latihan ini menggarisbawahi intensifikasi kerja sama militer antara Jepang dan AS, yang menyoroti komitmen bersama mereka terhadap stabilitas regional. Teori Mearsheimer menekankan bahwa tindakan militer kooperatif tersebut penting untuk meningkatkan pencegahan terhadap musuh potensial seperti Tiongkok.²⁹ Upaya Jepang dalam menambah aliansi dilanjutkan

²⁷ Hughes, Christopher. "Japan's 'Resentful Realism' and Balancing China's Rise." *Chinese Journal of International Politics*, vol. 9, no. 2, 2016, pp. 109–133. Oxford Academic, [doi:10.1093/cjip/pow004](https://doi.org/10.1093/cjip/pow004).

²⁸ Kirana and Irsadanar. "Japan's Strategy on Managing Territorial Disputes of Senkaku Islands" *Journal UMY*, vol. 9, no. 2, 2024, journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/download/16769/pdf.

²⁹ Schottli, Urs. "US-Japan Relations." 2024. GIS Reports Online, www.gisreportsonline.com/r/us-japan-relations/.

dengan bergabungnya mereka dalam Quad Leaders' Summit pada bulan Mei 2022. Hal ini menandai momen penting bagi kebijakan luar negeri Jepang terhadap Tiongkok. Para pemimpin dari Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat berkumpul untuk membahas kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik. KTT tersebut menekankan upaya kolektif untuk memastikan terimplementasinya konsep “*Free and Open Indo-Pacific*” sambil membahas kekhawatiran bersama tentang perilaku tegas Tiongkok di perairan regional. Forum multilateral ini mencontohkan strategi Jepang untuk meningkatkan kekuatan melalui aliansi dengan mendorong kolaborasi di antara negara-negara dengan persepsi ancaman yang sama.³⁰ Pada bulan September 2022, Jepang menandatangani perjanjian akses timbal balik dengan Australia, yang memungkinkan kerja sama militer yang lebih besar antara kedua negara. Perjanjian ini memfasilitasi latihan bersama dan dukungan logistik bagi pasukan yang beroperasi dalam menanggapi ancaman regional. Dengan memperkuat hubungan dengan Australia, Jepang bertujuan untuk meningkatkan kerangka keamanannya di kawasan Indo-Pasifik sekaligus mengimbangi pengaruh Tiongkok.³¹

c. Mengikuti Latihan Angkatan Laut Gabungan Pada Tahun 2023

Pada bulan Mei 2023, Jepang berpartisipasi dalam latihan angkatan laut gabungan dengan pasukan AS dan Australia di Laut Filipina. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas di antara pasukan sekutu sekaligus mengirimkan pesan yang jelas kepada Tiongkok mengenai tekad kolektif mereka melawan agresi di kawasan tersebut. Latihan tersebut mencakup operasi perang antikapal selam dan pelatihan keamanan maritim, yang menunjukkan komitmen Jepang untuk meningkatkan kemampuan militernya melalui upaya kolaboratif

³⁰ *Ibid.*

³¹ Nakatani, Hiroshi. "The Australia-Japan-US Trilateral: Forming Collective Deterrence in the Indo-Pacific." *The Diplomat*, 15 Nov. 2024, thediplomat.com/2024/11/the-australia-japan-us-trilateral-forming-collective-deterrence-in-the-indo-pacific/.

dengan sekutu.³² Pada bulan Agustus 2023, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk membahas penguatan kerja sama pertahanan antara negara mereka. Kedua pemimpin menekankan komitmen mereka untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh Tiongkok. Pertemuan ini menggarisbawahi strategi Jepang untuk mendiversifikasi aliansinya di luar mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Australia, dengan mengakui peran India sebagai pemain kunci dalam dinamika keamanan regional.³³

d. Menghadiri Diskusi ASEAN Terkait LTS Pada Tahun 2024

Pada bulan Februari 2024, Jepang berpartisipasi aktif dalam diskusi dalam Forum Regional ASEAN yang berfokus pada peningkatan kerja sama keamanan regional di tengah meningkatnya ketegangan terkait aktivitas maritim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Dengan melibatkan negara-negara Asia Tenggara melalui platform multilateral ini, Jepang berupaya memperkuat pengaruhnya sekaligus mendorong upaya kolaboratif melawan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh perilaku Tiongkok yang semakin mengancam. Pada bulan April 2024, Jepang memperluas kerja sama keamanan trilateral dengan Australia dan India melalui latihan angkatan laut bersama yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim sebagai respons terhadap aktivitas Tiongkok di perairan yang disengketakan. Latihan-latihan ini menggarisbawahi pentingnya upaya kolaboratif di antara para sekutu untuk menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik sekaligus memperkuat pernyataan Mearsheimer bahwa negara-negara harus memanfaatkan aliansi untuk memperkuat kekuatan mereka melawan ancaman bersama.

³² Nakatani, Hiroshi. "The Australia-Japan-US Trilateral: Forming Collective Deterrence in the Indo-Pacific." *The Diplomat*, 15 Nov. 2024, thediplomat.com/2024/11/the-australia-japan-us-trilateral-forming-collective-deterrence-in-the-indo-pacific/.

³³ Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Japan-Sweden Foreign Ministers' Meeting." Ministry of Foreign Affairs of Japan, www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/pageite_000001_00565.html.

4. Tidak Melibatkan Diri Secara Berlebihan

Tidak terlalu banyak terlibat dalam urusan internasional, khususnya dalam konteks aliansi dan intervensi militer. Hal ini mencerminkan pilihan strategis negara untuk menghindari perluasan sumber daya yang berlebihan dan terlibat dalam konflik yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional mereka. Pendekatan Jepang terhadap konflik di wilayah Taiwan dan Laut Cina Selatan dicirikan oleh kebijakan non-intervensi yang disengaja, yang mencerminkan lanskap geopolitik dan konteks historisnya yang kompleks. Strategi ini dibentuk oleh kendala konstitusional Jepang, hubungan historisnya dengan Taiwan, dan keinginannya untuk mempertahankan hubungan yang stabil dengan Tiongkok sambil juga menegaskan aliansinya dengan Amerika Serikat. Sifat multifaset dari pendekatan non-keterlibatan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi dinamika keamanan regional dan peran Jepang di dalamnya. Kebijakan non-intervensi Jepang berakar kuat dalam konstitusi pasca-Perang Dunia II, yang menolak penggunaan kekuatan militer sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional. Pasal 9 Konstitusi Jepang melarang Jepang mempertahankan pasukan militer untuk peperangan, yang telah menyebabkan ketergantungan pada Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) yang terutama difokuskan pada operasi pertahanan. Kerangka konstitusional ini telah menciptakan hambatan hukum bagi partisipasi aktif Jepang dalam konflik di luar perbatasannya, termasuk potensi keterlibatan militer di Taiwan atau Laut Cina Selatan. Bagi Jepang, prinsip ini sangat relevan dalam kebijakan luar negerinya terhadap Tiongkok karena kebijakan luar negeri Jepang secara historis dicirikan oleh strategi *hedging*, yang artinya menyeimbangkan aksi keterlibatan dengan cara pencegahan pasif (tidak secara langsung ditujukan kepada musuh). Pendekatan ini memungkinkan Jepang untuk mempertahankan tingkat fleksibilitas dalam hubungannya dengan Tiongkok sembari tetap bersiap menghadapi potensi ancaman.

a. Pendekatan Ganda Jepang Pada Tahun 2021

Pada awal tahun 2021, Jepang menyadari perlunya penilaian ulang yang strategis atas kebijakan luar negerinya di tengah

meningkatnya kekhawatiran tentang ekspansi militer Tiongkok dan perilaku asertif di Laut Tiongkok Timur. Pemerintah Jepang, di bawah Perdana Menteri Yoshihide Suga, Jepang mulai mengartikulasikan strategi *hedging* yang akan memungkinkannya untuk terlibat secara ekonomi dengan Tiongkok sambil secara bersamaan memperkuat kemampuan pertahanannya melalui aliansi, khususnya dengan Amerika Serikat. Penilaian ulang ini didorong oleh pemahaman bahwa Jepang perlu bersiap menghadapi potensi ancaman tanpa memprovokasi konfrontasi langsung. Pada bulan April 2021, Jepang dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Sambil menekankan keamanan kolektif, pernyataan tersebut juga menyoroti pentingnya keterlibatan diplomatik dengan Tiongkok. Pendekatan ganda ini mencontohkan strategi *hedging*, yang menyeimbangkan kesiapan militer dengan kerja sama ekonomi. Pernyataan bersama tersebut menunjukkan bahwa Jepang bersedia untuk terlibat dengan Tiongkok dalam masalah ekonomi sambil tetap waspada terhadap potensi ancaman keamanan.

b. Penekanan Kebijakan Non-Intervensi Pada Tahun 2023

Jepang, sebagai anggota Quad (bersama dengan Amerika Serikat, India, dan Australia), telah menunjukkan komitmen terhadap isu-isu maritim dan menyoroti Laut Tiongkok Selatan sebagai area prioritas strategis.³⁴ Akan tetapi, Quad hanya mengambil sedikit tindakan dalam domain maritim dan tidak ada yang secara langsung mempengaruhi dinamika sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang, seperti anggota Quad lainnya, mungkin berhati-hati dalam melakukan intervensi langsung dalam sengketa tersebut.³⁵ Pada bulan November 2023, selama diskusi di sebuah konferensi internasional tentang kerja sama keamanan, pejabat Jepang menegaskan kembali

³⁴ Bradford, John F, and Ralf Emmers. "Why the Quad Is Not Squaring off in the South China Sea: Evaluating Interests, Objectives and Capacity." *Australian Journal of International Affairs* 78.1 (2024): 1–21.

³⁵ Bradford, John F, and Ralf Emmers. "Why the Quad Is Not Squaring off in the South China Sea: Evaluating Interests, Objectives and Capacity." *Australian Journal of International Affairs* 78.1 (2024): 1–21.

komitmen mereka terhadap kebijakan nonintervensi terkait konflik yang melibatkan negara-negara tetangga seperti konflik pada Laut Tiongkok Selatan. Sikap ini menggarisbawahi pilihan strategis Jepang untuk tidak terlibat dalam konflik yang tidak secara langsung mengancam kepentingan nasionalnya sambil tetap mengadvokasi penyelesaian damai melalui dialog.³⁶

5. Mengambil Keputusan Strategis Dengan Pertimbangan Yang Rasional

Bertindak rasional sangat penting untuk memahami bagaimana negara menavigasi kompleksitas hubungan internasional. Rasionalitas, dalam konteks ini, mengacu pada kemampuan negara untuk membuat keputusan strategis yang memaksimalkan keamanan dan kepentingan mereka sambil meminimalkan risiko dan biaya.³⁷ Bagi Jepang, prinsip ini sangat relevan dalam pendekatannya untuk mengelola kebangkitan Tiongkok dari tahun 2021 hingga 2024. Kebijakan luar negeri Jepang dicirikan oleh tindakan penyeimbangan yang cermat, di mana ia berupaya untuk terlibat dengan Tiongkok secara ekonomi sambil secara bersamaan memperkuat kemampuan pertahanan dan aliansinya untuk mencegah potensi ancaman. Pendekatan rasional ini berakar pada konteks historis, realitas geografis, dan kebutuhan akan stabilitas di kawasan yang ditandai oleh persaingan dan ketidakpastian.

Dari tahun 2021 hingga 2024, Jepang telah secara aktif menerapkan pendekatan kebijakan luar negeri yang rasional terhadap kebangkitan Tiongkok dengan menyeimbangkan strategi keterlibatan dan pencegahan secara efektif. Melalui penilaian ulang yang strategis, partisipasi dalam latihan militer gabungan, penguatan perjanjian bilateral dengan sekutu seperti Australia dan India, dan terlibat secara diplomatis dengan Tiongkok sambil mempertahankan hubungan dekat dengan Amerika Serikat, Jepang telah berupaya untuk meningkatkan kerangka

³⁶ Hu, Bo. "Sino-US Competition in the South China Sea: Power, Rules and Legitimacy." *Journal of Chinese Political Science* 26.3 (2021): 485–504. Web. 25 Dec. 2024.

³⁷ Blasco, Emil. "Los Estados Son Casi Siempre Racionales en Política Internacional." Universidad de Navarra. Global Affairs, en.unav.edu/web/global-affairs/los-estados-son-casi-siempre-racionales-en-politica-internacional.

keamanannya di tengah lanskap geopolitik yang terus berkembang. Dengan bertindak secara rasional, mengakui perlunya saling ketergantungan ekonomi dan pentingnya kesiapan militer, Jepang bertujuan untuk menavigasi dinamika yang kompleks tanpa memicu konflik yang tidak perlu atau memperluas sumber dayanya secara berlebihan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa pengambilan keputusan yang rasional sangat penting untuk memastikan keamanan nasional sambil membina stabilitas dalam lingkungan internasional yang semakin kompetitif yang dicirikan oleh kerja sama dan persaingan antara kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.

6. Arah Tujuan Serta Hasil Implementasi Kebijakan Luar Negeri Jepang Bagi Kestabilan Kawasan

Negara yang berkekuatan besar pada dasarnya terdorong untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan memastikan kelangsungan hidup mereka, yang mendorong mereka untuk mengejar hegemoni regional. Dalam dunia anarkis di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk menegakkan aturan atau menjamin keamanan, negara harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri.³⁸ Hal ini mengarah pada lingkungan yang kompetitif di mana negara terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka relatif terhadap negara lain.³⁹ Sebagai kekuatan yang sedang naik daun, Tiongkok pasti akan mencari hegemoni regional di Asia, sama halnya dengan Amerika Serikat yang secara historis mencari dominasi di Barat. Upaya ini kemungkinan akan berujung pada konflik dengan negara *superpower*, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, yang akan berupaya menahan kebangkitan Tiongkok. Implementasi kebijakan luar negeri Jepang dari tahun 2021 hingga 2024 sangat selaras mengenai perilaku negara dalam sistem internasional yang anarkis. Perhitungan

³⁸ Steinsson, Sverrir. "John Mearsheimer's Theory of Offensive Realism and the Rise of China." *E-International Relations*, 6 Mar. 2014, www.e-ir.info/2014/03/06/john-mearsheimers-theory-of-offensive-realism-and-the-rise-of-china/.

³⁹ Barkin, Samuel. "Realism, Prediction, and Foreign Policy." *Foreign Policy Analysis*, vol. 5, no. 3, 2006, pp. 1–17. Wiley. <https://www.jstor.org/stable/24909777>

rasional yang dibuat oleh para pembuat kebijakan Jepang mencerminkan negara bertindak berdasarkan penilaian mereka terhadap ancaman dan peluang dalam konteks geopolitik mereka.

Pertama, pengakuan Jepang terhadap Tiongkok sebagai tantangan strategis yang signifikan bahwa negara-negara yang sedang bangkit akan mencari hegemoni regional. Dengan mengidentifikasi Tiongkok sebagai negara yang demikian dan menanggapiinya melalui modernisasi militer dan upaya membangun aliansi, Jepang menunjukkan pemahaman tentang dinamika persaingan yang melekat dalam hubungan internasional. Kedua, penekanan Jepang pada penguatan aliansi bahwa negara-negara akan mencari kemitraan untuk meningkatkan keamanan mereka terhadap calon agresor. Kemitraan Quad menggambarkan keselarasan ini, dengan berkolaborasi dengan negara-negara demokrasi lain di kawasan Indo-Pasifik, Jepang secara aktif berupaya untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok sambil memperkuat pengaturan keamanan kolektif. Lebih jauh, pendekatan Jepang mencerminkan negara harus bertindak rasional dalam menanggapi ancaman yang dirasakan. Strategi ganda untuk terlibat secara ekonomi dengan Tiongkok sekaligus meningkatkan kemampuan militer merupakan contoh pengambilan keputusan rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan nasional tanpa memicu konflik yang tidak perlu.

Menilik upaya Jepang yang dijelaskan pada subbab di atas, implementasi kebijakan luar negeri Jepang dari tahun 2021 hingga 2024, dengan mengakui kebangkitan Tiongkok sebagai tantangan strategis dan mengadopsi langkah-langkah yang meningkatkan kemampuan militernya sekaligus memperkuat aliansi, Jepang bertindak rasional dalam sistem internasional anarkis yang dicirikan oleh persaingan dan ketidakpastian. Hasil dari kebijakan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas regional sekaligus memajukan kepentingan nasional Jepang di tengah lanskap geopolitik yang terus berkembang yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara negara-negara besar.

3. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, kebijakan luar negeri Jepang terbentuk karena adanya kepentingan nasional Jepang untuk menghadapi ancaman kebangkitan Tiongkok yang semakin agresif secara militer dikawasan Asia Timur salah satunya berkaitan dengan penekanan klaimnya atas Pulau Senkaku. Postur pertahanan Jepang sebelumnya sangatlah terbatas dan sangat defensif, hal ini berakar dari ideologi pasifisme Jepang yang dipertahankan dari masa reformasi Jepang pasca perang dunia dua hingga sekarang, namun ketika Jepang dihadapkan dengan kebangkitan Tiongkok, Jepang justru terlihat mengubah postur pertahanannya dan terlihat mulai meninggalkan pasifisme tradisionalnya.

Jepang berupaya meningkatkan kekuatan negara demi keberlangsungan hidupnya dan mulai meninggalkan ideologi tradisionalnya ketika dihadapkan dengan ancaman besar yang dirasakan Jepang akibat kebangkitan Tiongkok, hal ini dapat dilihat dengan adanya pergeseran postur keamanan Jepang yang menunjukkan arah yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kemampuan pertahanan Jepang dibatasi dengan adanya ideologi pasifisme. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya upaya Jepang untuk menghadapi kebangkitan Tiongkok dan mengubah postur keamnanannya dengan: (1) Meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. (2) Meningkatkan kemampuan militernya dengan modernisasi militer serta mengeluarkan kebijakan kapasitas untuk serangan balik. (3) Meningkatkan aliansi dengan Amerika Serikat dalam pertahanan. (4) Tidak melibatkan diri secara berlebihan dalam konflik wilayah lain. (5) Ketika dihadapkan dengan ancaman yang nyata seperti kebangkitan Tiongkok, Jepang menunjukkan sikap yang tegas dalam memperkuat kemampuan militernya dan meningkatkan keamanan nasional sebagai tanggapan langsung ancaman Tiongkok.

REFERENSI

BUKU

Creswell, W John and Creswell David J. *Sixth Edition Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Metodhs Approaches*. 2023.

Donnelly, Jack. *Realism and International Relations*. Cambridge University Press, 2009.

Graebner, N. A. *Morgenthau as Historian _ 8 _ Truth and Tragedy _ Norman A. Graebner _*. 2020, pp. 66–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429339578-8>.

Griffith, Ed and Caroline Rose. *China-Japan Relations*. University of Central Lancashire, 2018. https://clock.uclan.ac.uk/23344/1/23344%20Wu%2520and%2520Frazier_CopyEd%2520MS_26.pdf.

Ichihara, Maiko. *Japan's International Democracy Assistance as Soft Power*. London: Routledge, 2019. Book.

Kirana and Irsadanar. "Japan's Strategy on MaPnaging Territorial Disputes of Senkaku Islands" *Journal UMY*, vol. 9, no. 2, 2024, journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/download/16769/pdf.

Krauss, E. S. *Japan-US Relations_ The Most Important Bilateral Relationship in the World _ The Oxford Handbook of Japanese Politics _ Oxford Academic*. 2021, pp. 810–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190050993.013.42>.

Kusumastuti Adhi dan Khoiron Mustamil Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Lebow, Richard Ned. "Hans J. Morgenthau." *The Tragic Vision of Politics*, Cambridge University Press, 2009, pp. 216–56, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511491504.007>.

Lobell, S. E. *Structural Realism_Offensive and Defensive Realism _ Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.304>.

Maitem, Jeffrey. 'Feeling the threat': South China Sea tensions, missile test push Japan closer to Philippines. 27 September 2024. <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3280249/feeling-threat-south-china-sea-tensions-missile-test-push-japan-closer-philippines>.

Mathur, Arpita. "Japan and China in India's Foreign Policy." *China-Japan Relations in the 21st Century: Antagonism Despite Interdependency*, Springer Singapore, 2017, pp. 337–54, https://doi.org/10.1007/978-981-10-4373-4_14.

Mearsheimer, John J., and Rostato Sebastian. *HOW STATES THINK THE RATIONALLY of FOREIGN POLICY*. 1st ed., 2023.

Ministry of Defense of Japan. Defense of Japan 2024 Digest. Ministry of Defense of Japan, 2024, www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2024/pdf/DOJ2024_Digest_EN.pdf.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Japan's Foreign Policy to Promote National and Worldwide Interest." Japan, Ministry of Foreign Affairs of.

Diplomatic Bluebook 2021. Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2021.
Book Section. <https://www.mofa.go.jp/files/000106463.pdf>

Mudjiyanto, Bambang. *TIPE PENELITIAN EKSPLORATIF KOMUNIKASI EXPLORATORY RESEARCH IN COMMUNICATION STUDY*. 2018.

Patrick James. *Realism and International Relations: A Graphic Turn Toward Scientific Progress*. Oxford University Press, 2022.

Reilly, James. “*Forgetting and Remembering the Past: China’s Relations with Japan, 1949–1999*”, *Strong Society, Smart State: The Rise of Public Opinion in China’s Japan Policy*. Columbia Scholarship Online, 2011.

Rex Li. *China’s Sea Power Aspirations and Strategic Behaviour in the South China Sea from the Theoretical Perspective of Identity Constructions*. Springer, Cham, 2016.

Sakaki, Alexandra. “Keeping the Dragon at Bay: The South China Sea Dispute in Japan’s Security Strategy.” *Power Politics in Asia’s Contested Waters*, 2016, pp. 425–40.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. 1st ed., Graha Ilmu, 2006.

Taira. *Building a New Japan: A Plan for Remodeling the Japanese Archipelago* by Kakuei Tanaka. Cambridge University Press, 2018. Published online 6 September 2018.

Thomas J. Volgy, et al. "Major Power Status in International Politics." *Evolutionary Processes in World Politics ((EPWP))*, Palgrave Macmillan, New York, 2011, pp. 1–26.

The Asia Foundation. US-China-Southeast Asia Relations: Challenges and Opportunities for Regional Cooperation. New York: The Asia Foundation, 2024. <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2024/10/US-China-Southeast-Asia-Relations-Challenges-and-Opportunities-for-Regional-Cooperation.pdf>.

Tsunekawa, Jun. The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan. Tokyo: National Institute for Defense Studies, 2009. No. 4.

Watson, Adam. "Morgenthau's Concept of the National Interest and the New States of the Third World." *Truth and Tragedy*, 1st ed., Routledge, 1984, p. 11.

Wijaya, Hengki. *Ringkasan Dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof. Burhan Bungin)*. 2018.

Yamauchi, Masayuki, and Yuichi Hosoya. *Modern Japan's Place in World History From Meiji to Reiwa*. Chuokoron-Shinsha. Inc., 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-9593-4>.

JURNAL/ARTIKEL

Aditya Shirai, Yusuke. "An Institutional Approach: Japan's Prime Minister Junichiro Koizumi's Controversial Visits to the Controversial Yasukuni Shrine." Master's thesis, Nishogakusha University, Japan, 2007. Accessed online.

- Aini Qurrata Resi. "Kedekatan Cina-Jepang Di Tengah Perang Dagang Cina-Amerika Serikat Pada 2018-2019: Analisis Teori Complex Interdependence." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol. 11, 2021.
- Amako, Satoshi. "China, the Emerging Superpower and Drifting Sino-Japanese Relations." *Journal of Contemporary East Asia Studies*, vol. 1, no. 1, Jan. 2012, pp. 73-95, <https://doi.org/10.1080/24761028.2012.11869053>.
- Anders, Wivel. "Realism in Foreign Policy Analysis." *Departemen of Political Science, University of Copenhagen*, Sept. 2024, pp. 1-22.
- Atanassova-Cornelis, Elena. "The Political and Security Dimension of Japan-China Relations: Strategic Mistrust and Fragile Stability." *Pacific Focus*, vol. 26, no. 2, 2011, pp. 165-87, <https://doi.org/10.1111/j.19765118.2011.01061.x>.
- Akimoto, Daisuke. "Fumio Kishida: Kishida Diplomacy Toward a World Without Nuclear Weapons." *Japanese Prime Ministers and Their Peace Philosophy: 1945 to the Present*. Singapore: Springer Singapore, 2022. 341-347.
- Almassi, Berkay. "Offensive Realism and the Rise of China: A Useful Framework for Analysis." *E-International Relations*, 9 July 2021, www.e-ir.info/2021/07/09/offensive-realism-and-the-rise-of-china-a-useful-framework-for-analysis/.

AP News. "Japan's Military Budget to Grow as Tensions Rise with China." AP News, 20 Dec. 2024, apnews.com/article/japan-military-budget-us-australia-china-f82c70bd6f5cbfc184f15cf17f2fde21.

Asahi Shimbun. "China and Japan Hold Talks on Taiwan, North Korea, and Regional Security." Asahi Shimbun, 12 Aug. 2022, web.archive.org/web/20220812063020/https://www.asahi.com/ajw/articles/14687821

Barkdoll, C. Timothy. *The US-Japan Security Alliance: Welcoming A New Japan*. 2006, [https://doi.org/https://doi.org/10.21236/ada449819](https://doi.org/10.21236/ada449819).

Barkin, Samuel. "Realism, Prediction, and Foreign Policy." *Foreign Policy Analysis*, vol. 5, no. 3, 2006, pp. 1-17. Wiley. <https://www.jstor.org/stable/24909777>.

Bloomberg News. "Japan Scrambles Fighters After Chinese Military Plane Incursion." Bloomberg, 26 Aug. 2024, www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-26/japan-scrambles-fighters-after-chinese-military-plane-incursion.

Bradford, John F, and Ralf Emmers. "Why the Quad Is Not Squaring off in the South China Sea: Evaluating Interests, Objectives and Capacity." *Australian Journal of International Affairs* 78.1 (2024): 1-21.

Chang, Xiao. "THE TRANSFORMATION OF JAPAN'S POLICY TOWARDS CHINA ON THE EVE OF THE NORMALIZATION OF SINO-JAPANESE DIPLOMATIC RELATIONS: AN EXAMINATION BASED ON JAPANESE DIPLOMATIC ARCHIVES." *Journal of Int'L Affairs*, vol. 7, no. 2, 2024.

Charles L. Glaser. "Realism." *Oxford University Press*, 2022.

Chiang, Min Hua. "Contemporary China-Japan Relations: The Politically Driven Economic Linkage." *East Asia*, vol. 36, no. 4, Dec. 2019, pp. 271–90, <https://doi.org/10.1007/s12140-019-09321-x>.

Center for Strategic and International Studies (CSIS). "Japan's New National Security Strategy." Center for Strategic and International Studies, 18 Dec. 2022, www.csis.org/analysis/japans-new-national-security-strategy.

Chong, Ja Ian. "John Mearsheimer in China: Offensive Realism Resonates Amid Intellectual Rivalry." RSIS Publications, S. Rajaratnam School of International Studies, 18 Oct. 2022, www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/john-mearsheimer-in-china-offensive-realism-resonates-amid-intellectual-rivalry/.

Ciorciari, John. Japan as a diplomatic asset to ASEAN. 5 Oktober 2023. Website. <https://eastasiaforum.org/2023/10/05/japan-as-a-diplomatic-asset-to-asean/>.

D'ambrogio, Enrico. "Japan's Parliament and other political institutions." 2020.

Drea, Edward J., and Hans Van de Ven. An Overview of Major Military Campaigns during the Sino-Japanese War, 1937–1945. Na, 1937.

Dharmaputri, Archangela Rachel. "Struggle of the restricted: Japan's strategic approach towards China's assertiveness in the South China Sea." (2022). <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/14866>.

Ehsan, Mehmood Khan. "NATIONAL INTEREST: PERSPECTIVES AND PRACTICES.' ." *Journal of Contemporary Studies*, vol. 11, no. 1, Aug. 2022, pp. 17–33.

Fukuda, Madoka, Adam Liff and Yasuhiro Matsuda. Assessing the Future Trajectory of China-Japan Relations. 2 March 2023. <https://interpret.csis.org/assessing-the-future-trajectory-of-china-japan-relations/>

Fung, A. (1996). Testing the Self-Strengthening: The Chinese Army in the Sino-Japanese War of 1894–1895. *Modern Asian Studies*, 30(4), 1007–1031. <https://doi.org/10.1017/s0026749x00016875>

Garret Banning and Glaser Bonnie. "Chinese Apprehensions about Revitalization of the U.S.-Japan Alliance." *Source: Asian Survey*, vol. 37, no. 4, June 2014, pp. 383–402, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2645655>.

Gong, Shun, and Kikuko Nagayoshi. "Japanese Attitudes Toward China and the United States: A Sociological Analysis." *Chinese Sociological Review*, vol. 51, no. 3, July 2019, pp. 251–70, <https://doi.org/10.1080/21620555.2019.1611374>.

Gordon, David M. "The China-Japan War, 1931-1945." *The Journal of Military History* 70.1 (2006): 137-182.

Govindasamy, Geetha. "EVOLUTION OF JAPAN'S PACIFIST TO REALIST DIPLOMACY: FROM YOSHIDA SHIGERU TO FUMIO KISHIDA."

WILAYAH: The International Journal of East Asian Studies 12.2 (2023): 57-68.

Gustafsson, K. (2014). Identity and recognition: remembering and forgetting the post-war in Sino-Japanese relations. *The Pacific Review*, 28(1), 117–138. <https://doi.org/10.1080/09512748.2014.970053>

Hill, Fiona, et al. Balancing act: Major powers and the global response to US-China great power competition. July 2020. <https://www.brookings.edu/articles/balancing-act-major-powers-and-the-global-response-to-us-china-great-power-competition/>.

Hughes, Christopher. “Japan’s “Resentful Realism” in Balancing China’s Rise.” *The Chinese Journal on International Politics* 9.2 (2016): 109-150

He, Yinan. “40 Years in Paradox: Post-Normalisation Sino-Japanese Relations.” *China Perspectives*, vol. 2013, no. 4, Dec. 2013, pp. 7–16, <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.6314>.

Huang, Wentao. “Research on China-Japan Bilateral Relations-A Stable and Fragile Bilateral Relationship.” *Business, Economics and Management WTED*, vol. 2024, 2024.

Ichihara, Maiko. Japan’s International Democracy Assistance as Soft Power. London: Routledge, 2019. Book.

Ikenberry, John. “John Mearsheimer’s Theory of Offensive Realism and the Rise of China.” *E-International Relations*, 6 Mar. 2014, www.e-ir.info/2014/03/06/john-mearsheimers-theory-of-offensive-realism-and-the-rise-of-china/.

- Jeffrey Ordaniel. "Internationalization, Legalization and Deterrence: The United States and Japan in the South China Sea." *Asian International Studies Review*, vol. 16, no. 2, Dec. 2015, pp. 93–119, <https://doi.org/10.16934/isr.16.2.201512.93>.
- Khan, Arsh Shahid, and Aiysha Safdar. *EMERGING US-JAPAN RELATIONS AND IMPACT ON EAST ASIAN SECURITY*. *Margalla Papers*, 25(2), 109–120. 2021. <https://doi.org/10.54690/margallapapers.25.2.78>
- Khoiriati, Siti Daulah. "Hubungan Internasional di Asia Timur." DIHI: Student Working Paper 5.2 (2021). <https://simpan.ugm.ac.id/s/77Eaj4ScDKmH0Hp>.
- Koga, Kei. "Japan's diplomatic strategy toward East Asia: Creation and evolution of 'dual-track Diplomacy' in the post-Cold War era." *Baltic Journal of European Studies* (2019).
- Korwa, Johni Robert Verianto. "Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia." *Jurnal Hubungan Internasional* 8.1 (2019).
- Kumar, Sudeep. "Shinzo Abe and Japan-China Security Relations: Irritants and Legacies." *Indian Council of World Affairs*, Apr. 2023, ISBN: 978-93-83445-78-3.
- Kim, Kyu Hyun. "The Sino-Japanese War (1894-1895): Japanese National Integration and Construction of the Korean "Other": Japanese National Integration and Construction of the Korean "Other"." *International Journal of Korean History* 17.1 (2012): 1-2.

Kuo, Mercy A. "John Mearsheimer's Theory of Offensive Realism and the Rise of China." *E-International Relations*, 6 Mar. 2014, www.e-ir.info/2014/03/06/john-mearsheimers-theory-of-offensive-realism-and-the-rise-of-china/.

Lechner, Silviya. "Why Anarchy Still Matters for International Relations: On Theories and Things." *Journal of International Political Theory*, vol. 13, no. 3, Oct. 2017, pp. 341–59, <https://doi.org/10.1177/1755088217713764>.

Lomia, Ekaterine. "Political Realism in International Relations: Classical Realism, Neo-Realism, and Neo-Classical Realism." *International Journal of Social, Political and Economic Research*, vol. 7, no. 3, Sept. 2020, pp. 591–600, <https://doi.org/10.46291/ijospervol7iss3pp591-600>.

Lippert, Barbara and Volker Perthes. "Strategic Rivalry between United States and China." *Stiftung Wissenschaft und Politik* (2020).

Lobell, Steven E. "The Evolution of Offensive Realism." *Politics and the Life Sciences*, vol. 40, no. 1, 2021, pp. 91–93. Cambridge University Press, [doi:10.1017/pls.2021.7](https://doi.org/10.1017/pls.2021.7).

Mearsheimer, John J. "Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War." *International Security*, vol. 15, no. 1, 1990, pp. 5–56. JSTOR, www.jstor.org/stable/2539020

Mearsheimer, John J. "The Tragedy of Great Power Politics." *Foreign Affairs*, vol. 80, no. 1, 2001, pp. 22–43. JSTOR, www.jstor.org/stable/3092155.